

Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Darul lailatul Qomariyah, M. Ag

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

paitarbiyahiairm@gmail.com

Abstract

Global life is something that cannot be avoided, and indeed it is not necessary to avoid it. But the problem is how to empower Muslims to color the global culture. For this reason, the role of Islamic education is very significant in providing provisions for humanity to be able to move swiftly in the area of globalization. In short, the quality of our education is still very concern. Its rank is far below other countries. In addition, the educational problems experienced by Indonesia also cause a decline in the academic moral quality of our education which causes the ultimate purpose of education is never seen and influential in our lives. Although it is recognized that it is still very difficult to see signs that allow our education get a resurgence and have an increasingly large role in the future, we are always required to "scavenge" the signs of its development. The handling of various educational problems cannot be done by one component only, especially if it is imposed to the government itself. Because educational activities are collective activities and education development is the collective task of all components of the nation. For this reason, raising public participation is something that needs to be pursued.

A. Pendahuluan

Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat tinggi sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa “Siapa yang ingin memperoleh kesuksesan di dunia, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Siapa yang ingin selamat di akhirat hendaklah ia menuntut ilmu. Dan siapa saja yang ingin sukses di dunia dan akhirat maka hendaklah ia menuntut ilmu (al-Hadis). Penempatan ilmu pengetahuan tersebut berimplikasi pada dua hal. *Pertama*, posisi orang yang terdidik berada pada tempat yang strategis¹¹. *Kedua*, posisi ilmu yang strategis tersebut menyebabkan posisi segala kegiatan pendidikan menjadi sangat strategis pula. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam pengertian yang luas, yaitu setiap usaha dan aktivitas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang lain untuk memanusiakan manusia yang berkualitas prima yang dilakukan dengan cara pencerahan, perberdayaan, pemberadaban, serta pengimanan.

Dalam perspektif Islam, guru atau pendidik yang tertinggi adalah Allah SWT, yang merupakan sumber dari segala ilmu (*alim*). Dengan demikian setiap ilmu harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Demikian juga proses transfer ilmu haruslah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Allah.

B. Hakikat Tujuan Pendidikan

Berbicara mengenai pendidikan Islam, apalagi di tengah dunia yang semakin mengglobal, yang menjadi topik adalah bagaimana memberdayakan manusia di era global dengan tetap berpegang teguh pada Islam. Kehidupan global adalah hal yang tidak dapat dihindari, dan memang tidak perlu untuk dihindari. Seperti pernah ditulis Akbar S.Ahmed :

¹ (Q.S. 35/Fâthir : 28: 58/al-Mujadalah:11).

“Abad ke-21 tidak dapat memandang rendah Islam, karena Islam tetap merupakan suatu kekuatan tersendiri. Sebaliknya, Islam pun harus menerima abad ke-21. Sikap menolak bukanlah jalan keluar yang tepat. Dengan kata lain Islam harus akrab dengan abad-21, dengan cara itu Islam pun akan memperoleh keharmonisan dalam tubuhnya sendiri”.²

Bertitik tolak dari gagasan pembangunan pendidikan Islam, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana memberdayakan umat Islam agar turut mewarnai budaya global. Untuk itu peran pendidikan Islam sangat signifikan dalam memberi bekal kepada umat manusia untuk dapat bergerak lincah di kancah globalisasi tersebut.

Pada dasarnya pendidikan diselenggarakan bukan semata-mata membekali anak didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, namun pendidikan juga harus berorientasi pada pemberian bekal kepada anak didik agar mampu menjalani kehidupannya dengan baik, terutama dalam situasi dan kondisi di era arus globalisasi. Dijelaskan dengan tegas dalam UU Sisdiknas tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan selain bertujuan mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, juga bertujuan agar anak didik menjadi manusia yang cakap, kreatif dan mandiri³. Tiga hal tersebut (kecakapan, kreatifitas dan kemandirian) menjadi hal penting bagi anak didik agar ia cakap menghadapi realitas hidupnya, kreatif dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang ada, mandiri dalam mencari penghidupan dan menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Dengan demikian akan terwujud insane yang

² Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam: Making Sense Of Muslim History and Society*, (London and New York: Routledge 1990), Hal. 8

³ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, (Bandung : Citra Umbara), 2003

tidak saja terampil (*skilled*) dan pandai (*intelligent*), melainkan juga kreatif dan cerdas (*smart*)⁴.

Sementara itu E. Mulyasa menegaskan bahwa tantangan kehidupan di masa yang akan datang menuntut manusia untuk hidup secara mandiri sehingga anak didik harus dibekali dengan kecakapan (*life skill*) melalui muatan, proses pembelajaran dan aktivitas lain di sekolah⁵. Kecakapan hidup di sini tidak hanya semata terkait dengan motif ekonomi secara sempit, tetapi lebih luas menyangkut aspek social dan budaya. Dengan demikian pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup pada hakekatnya adalah pendidikan untuk membentuk watak dan etos⁶. Dalam pengejawantahannya, dapat disusun kurikulum yang dapat mengaktualisasikan potensi anak didik sehingga nantinya ia dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai problem yang dihadapinya. Di samping itu sekolah juga dapat mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dengan prinsip pendidikan berbasis luas serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah (partisipasi masyarakat) dengan memberi peluang pemanfaatan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

C. Problema Dunia Pendidikan Kita

Secara garis besar kualitas pendidikan kita masih sungguh amat memprihatinkan. Peringkatnya di bawah negara-negara lain bahkan negara-negara Asia Tenggara sekalipun, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kelambanan peningkatan kualitas tersebut diakibatkan oleh beberapa aspek,

⁴ Musthofa Rembangy, M.Si, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta : TERAS), 2010, hal.131

⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, Implementasi Dan Inovasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2002, hal.30

⁶ Lihat www.dikdasmen.depdiknas.go.id, Program dan Strategi

antara lain: *Pertama*, perumusan kurikulum pendidikan kita yang –selain tidak dapat mengantisipasi cepatnya tantangan dan transformasi sosial dan ilmu pengetahuan—juga kebijakan mengenyainya selalu mengalami perubahan sejajar dengan perubahan situasi politik dan pengelola pemerintahan. *Kedua*, komersialisasi pendidikan lebih menonjol daripada visi bahwa pendidikan itu sebagai transmisi ilmu dan transfer ilmu pengetahuan sebagai jalan satu-satunya pengembangan sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Hal ini diperparah oleh kecenderungan materialistik dan pragmatisme masyarakat, termasuk insan pendidikan yang menjadikan tugasnya sebagai tugas sampingan (nyambi) di samping kegiatan mencari “tambahan penghasilan lainnya”. *Ketiga*, kualitas tenaga pendidik yang sangat rendah akibat tidak adanya kesempatan mengembangkan keahlian dan skillnya serta kurangnya karakter peneliti di kalangan sebagian besar tenaga pendidik kita. *Keempat*, tingkat keterpelajaran masyarakat yang masih rendah menyebabkan sedikitnya kontribusi masyarakat dan lingkungan pendidikan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. *Kelima*, lemahnya konkretisasi ilmu pengetahuan dalam pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, akibat rendahnya budaya eksperimen di dunia pendidikan kita.

Faktor-faktor itu menyebabkan para lulusan dunia pendidikan kita menjadi gamang dalam memainkan perannya sebagai kaum terpelajar di era global dan lemahnya kemampuan mereka dalam *sosial engineering* atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia. Pada saat yang sama juga ilmu pengetahuan yang mereka miliki kurang *aplicable* dan berfungsi bagi peningkatan taraf hidup dan pengembangan masyarakat.

Problema-problema pendidikan tersebut juga menyebabkan menurunnya kualitas moral akademik dunia

pendidikan kita yang menyebabkan tujuan hakiki dari pendidikan itu tidak pernah tampak dan berpengaruh dalam kehidupan kita.

D. Unsur-Unsur Penting dalam Pendidikan

Secara garis besar ada empat unsur yang terpenting dalam pembangunan pendidikan Islam: *Pertama*, materi keilmuan yang ingin ditransfer. *Kedua*, guru sebagai pihak pentransfer. *Ketiga*, murid sebagai penerima transfer ilmu. *Keempat*, sarana-sarana yang digunakan dalam kegiatan transfer tersebut.

Materi keilmuan yang ditransfer adalah ilmu pengetahuan yang benar (*Islam*). Di sini tidak dikenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Dengan demikian setiap informasi keilmuan adalah ilmu pengetahuan Islam yang diajarkan oleh Allah SWT kepada umat manusia⁷.

Sementara itu profesi kehidupan tertinggi dalam perspektif Islam adalah pengajar (dalam arti yang luas), sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*Jadilah kamu sebagai guru atau murid atau pendengar atau simpatisan, jangan kamu menjadi yang kelima yang akan menyebabkanmu binasa*” (*al-Hadis*).

Posisi strategis ini tidak hanya dimiliki profesi keguruan, tetapi aktivitas transfer ilmu untuk setiap bidang kehidupan. Oleh karenanya guru harus menjadi teladan, dan untuk itu ia layak mendapat penghormatan (dari Allah dan manusia).

Kegiatan mencari ilmu haruslah dengan penuh kesungguhan (*jaddun*). Oleh karenanya seluruh kegiatannya merupakan *fi sabilillah*. Karena aktivitas ini merupakan *fi sabilillah*, maka kegiatannya pun harus didasarkan pada niat

⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Aqlu wal-Ilmu fil-Quranil-Karim*, terj.: *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1996

yang baik dan ikhlas (*liyatafaqqahu fiddîn*). Dengan demikian sarana yang digunakan dalam pendidikan (gedung, referensi, busana, media), haruslah baik, halal, dan sesuai standart, agar efektif untuk mencerdaskan dan memperbaiki budi pekerti.

Unsur-unsur penting yang tidak memenuhi standart akan berakibat pada kegiatan pendidikan yang tidak efektif atau pendidikan yang hanya bisa mencerdaskan, tetapi tidak dapat membangun integritas islami, seperti diharapkan dalam pendidikan. Bertitik tolak dari analisis di atas, maka kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan Islam adalah kehandalan dalam hal *Intellectual Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ), dan *Spiritual Quotient* (SQ), dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Memiliki penguasaan ilmu yang mumpuni dan kemampuan mengintegrasikan ulum al-naqliyah dan ulum al-aqliyah, serta konkritisasinya di tengah kehidupan yang nyata.
- Memiliki kemahiran hidup (*living skills*), sehingga para lulusannya mempunyai sifat mandiri (*self reliance*) yang tinggi tanpa tergantung sepenuhnya kepada pihak lain.
- Memiliki tauhid yang benar sebagai kerangka dasar (*Welstanchaung*) dalam memandang hidup dan setiap permasalahan.
- Memiliki keluhuran moral, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.

E. Tanda-Tanda Perkembangan

Meskipun diakui masih sangat sulit melihat tanda-tanda yang memungkinkan dunia pendidikan kita akan mengalami kebangkitan dan memiliki peran yang semakin besar di masa depan, kita selalu dituntut untuk “mengais-ngais” isyarat-isyarat perkembangannya, yang kurang lebih dapat dirumuskan dalam beberapa hal.

Pertama, adanya upaya peningkatan keharusan alokasi dana pendidikan baik secara nasional dan daerah menjadi 20%. Perlu diakui bahwa interpretasi dan pelaksanaan keniscayaan ini masih variatif di kalangan decision maker, namun arah ini menunjukkan tanda-tanda baik bagi perkembangan dunia pendidikan kita di masa depan. Sayangnya, realokasi dana pendidikan yang ada, masih difokuskan pada revitalisasi dan rehabilitasi sekolah yang mengalami masalah fisik, terutama pada sekolah rusak berat, belum menyentuh pada sumber daya manusianya.

Kedua, sertifikasi tenaga pendidik yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan dedikasinya pada kerja pendidikan.

Ketiga, Program Indonesia Pintar, yang menysasar anak-anak yang telah putus sekolah agar bisa mendapatkan akses pendidikan.

Keempat, di ranah pendidikan tinggi anggaran dialokasikan untuk kebutuhan beasiswa di pendidikan tingkat tinggi, di antaranya program beasiswa bidik misi yakni memberi peningkatan akses yang tidak mampu secara ekonomi untuk bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, pendanaan juga diberikan pada program-program teknologi untuk masyarakat.

F. Upaya Membangkitkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis dan selalu berkembang (Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, 2003 : 191). Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam

kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 faktor pendukungnya yaitu : adanya kemauan , kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet : 1992). Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi dating dari pihak luar yang memberikan peluang. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat, meskipun pemerintah juga telah memberikan peluang, maka partisipasipun juga tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak adanya ruang atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga atau kelompok masyarakat, maka partisipasipun juga tidak akan terjadi.

Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan . Sebaliknya pihak pemerintah atau Negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan, seperti pepatah orang jawa ‘ ‘ Rawe-rawe rantas , malang-malang putung’ ’ atau dalam Bahasa indonesianya ‘ ‘Bercerai kita runtuh, Bersatu kita teguh’ ’. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka

dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- 1) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui

keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Agar kemampuan untuk berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat, maka perlu peningkatan sumber daya manusia dengan cara memperbaharui tiga jenis pendidikan masyarakat baik formal, nonformal maupun informal. Akses yang luas terhadap tiga jenis pendidikan tersebut akan mempercepat laju tingginya tingkat pendidikan dan pada gilirannya akan membuat masyarakat mampu untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan.

Pendidikan yang bertujuan membentuk *insan kamil* pada prosesnya membutuhkan pemahaman yang integrative antara lembaga pendidikan, kurikulum dan masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan, kurikulum dan masyarakat sebenarnya saling bergantung antara satu sama lain. Hanya dengan pendidikan dan perencanaan kurikulum yang mantap, maka akan lahir masyarakat yang mampu hidup dengan jiwa kebersamaan dan tahu akan tujuan penciptaannya. Dengan demikian keterpaduan antara lembaga pendidikan, kurikulum dan masyarakat akan melahirkan sebuah konsep pendidikan yang integrative yang selanjutnya akan membawa kepada proses pengintegrasian pendidikan, kurikulum dan masyarakat. Dan pada akhirnya, kita akan membentuk sebuah masyarakat yang berjiwa kebersamaan, mengenal hakikat kebenaran, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan cara yang betul dan seterusnya mencapai konsep mengenal hakikat diri. Itulah sebenarnya tujuan pendidikan.

Semakin kompleksnya problematika pendidikan yang kita hadapi saat ini menjadikan penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu komponen, apalagi kalau diserahkan kepada pemerintah saja. Sebab kegiatan pendidikan adalah merupakan kegiatan kolektif dan pembangunan pendidikan merupakan tugas kolektif seluruh komponen bangsa.

Partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah menempati posisi yang penting. Dalam konteks otonomi dan pemberdayaan sekolah, partisipasi masyarakat harus ditangani dan dibangun secara serius agar tumbuh kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Partisipasi masyarakat dibangun lewat proses penyadaran yang panjang dan strategis untuk mengubah pemikiran bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat.

Untuk itu membangkitkan partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang perlu diupayakan. Partisipasi tersebut dapat dijalankan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, masyarakat tidak dapat menyerahkan begitu saja pendidikan anak-anak mereka kepada lembaga-lembaga pendidikan, sebab sebagian besar atau minimal separuh dari waktu mereka berada di tengah masyarakat. Jika dalam perspektif Islam kita kenal jargon ‘rumahku adalah surgaku’ maka dalam perspektif pendidikan seyogyanya dikembangkan ‘rumahku adalah sekolahku’ (home school). Hal ini merupakan tradisi agung masyarakat Islam. Sebab sebagian besar para ahli dan ulama Islam menekuni pendidikan di rumah mereka. *Kedua*, Realokasi belanja keluarga dengan memperhatikan dan mengutamakan dana pendidikan. Banyak keluarga yang belum mengalokasikan dana keluarganya yang memadai untuk pendidikan anak-anaknya. Sedikit sekali dana keluarga yang digunakan untuk biaya kursus, beli buku, majalah, dan penelusuran informasi keilmuan

di dunia maya, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat menambah pengetahuan anak-anak mereka. *Ketiga*, Revitalisasi lembaga-lembaga agama dan rumah-rumah ibadah sebagai lembaga pendidikan. Rumah-rumah ibadah dan ormas-ormas kita belum bertindak sebagai lembaga pendidikan yang efektif, sebab orientasi lembaga-lembaga keagamaan dan ormas lebih kepada masalah-masalah sosial dan politik. Tidak seperti pada masa Nabi dan para Khalifah yang ‘arif bijaksana yang menjadikan rumah-rumah ibadah yang juga sebagai lembaga pendidikan yang efektif. *Keempat*, Meningkatkan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Keadaan masyarakat yang ‘latah’ dengan komersialisasi pendidikan membuat orang tua mengandalkan ‘ilmu pendekatan’ dan penggunaan materi bagi formalitas kualitas pendidikan anak-anak mereka. *Kelima*, perlunya pembentukan sikap terpelajar (*being educated*) dan masyarakat terpelajar (*educated society*) yang dapat mewarnai lingkungan anak-anak didik di tengah keluarga dan masyarakat.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam adalah sebuah keniscayaan. Dengan harapan bahwa proses pendidikan yang ada dapat menegaskan kembali tujuan agama Islam sebagai Rahmatan lil ‘alamin, pendidikan agama untuk kebersamaan dan toleransi, mengawal moralitas umat manusia serta dapat menjadi spirit dalam menggali keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang dan akan terjadi.

Oleh karenanya agar pendidikan kita dapat berjalan efektif di setiap tingkat dan bentuknya, sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

- Ahmed, Akbar S., *Discovering Islam: Making Sense Of Muslim History and Society*, London and New York: Routledge, 1990.
- Hasmori, A. A., Sarju, H., Norihan, I. S., Hamzah, R., & Sukr Saud, M. (2011). Pendidikan , Kurikulum Dan Masyarakat : Satu Integrasi. *Journal of Edupres*, 1(September), 350–356.
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/03/partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan/>
- Mulyasa,E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, Implementasi Dan Inovasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, Dr., *Al-Aqlu wal-Ilmu fil-Quranil-Karim*,terj.:*Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1996.
- Rembany, Musthofa, M.Si, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, Yogyakarta : TERAS, 2010.
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bandung : Citra Umbara, 2003.
www.dikdasmen.depdiknas.go.id, PROGRAM dan STRATEGI